



DPRD KOTA YOGYAKARTA
 SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA Telp.(0274) 540650

Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Berbasis Wilayah

YOGYA (KR) - Keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan program pembangunan yang ada di wilayahnya perlu terus didorong. Hal ini sebagai bagian keselarasan isu strategis pembangunan daerah berbasis kewilayahan. Di samping itu, hal administratif dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga perlu dikonsolidasikan supaya setiap usulan mampu terakomodir anggaran.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro SH, mengaku usulan program dari warga selama ini banyak yang mengandalkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan. "Tetapi musrenbang kelurahan itu kebanyakan hanya menjabarkan program dari tingkat kota saja. Kalau ada usulan pun hanya dari beberapa tokoh saja, belum menyentuh aspek masyarakat secara umum," urainya, Selasa (20/4).

Idealnya musrenbang dari tingkat bawah memiliki porsi cukup besar untuk diakomodir oleh anggaran daerah. Program yang diusulkan oleh masyarakat selalu berangkat dari kebutuhan di wilayahnya. Hal itu menunjukkan tingkat kepedulian warga terhadap pembangunan daerah. Jika diakomodir, maka hasil program pun memiliki tingkat kualitas yang lebih optimal.

Wisnu mengaku, prioritas anggaran memang selalu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Wisnu Sabdono Putro SH
Fraksi PDI Perjuangan



Menengah Daerah (RPJMD). Namun demikian, setiap usulan yang masuk harus ditampung terlebih dahulu. Sedangkan untuk penyesuaian disesuaikan dengan potensi wilayah. Sehingga program yang belum terakomodir tetap menjadi pertimbangan untuk tahun selanjutnya serta tersampaikan secara terbuka ke masyarakat. "Setiap kami di anggota dewan juga memiliki akun dalam SIPD. Ketika melalui musrenbang belum masuk, bisa kami perjuangkan melalui pokok pikiran dewan. Tetapi bahasa kamus dalam SIPD juga masih perlu diselaraskan," urainya.

Menurutnya, setiap program yang hendak diusulkan masuk kegiatan anggaran harus sesuai dengan bahasa kamus dalam SIPD. Mulai nama program, jenis kegiatan hingga perangkat daerah yang mengampu. Jika ada yang tidak selaras, maka usulan tersebut otomatis akan tertolak dalam sistem hingga berujung tidak terakomodir.

Oleh karena itu, keselarasan isu strategis melingkupi banyak hal yang masih butuh dikonsolidasikan bersama. Selain memperbesar peluang usulan dalam musrenbang kelurahan hingga entry penyesuaian yang didasarkan potensi wilayah, juga harmonisasi bahasa kamus dalam SIPD, "Masyarakat jangan pernah ragu untuk mengusulkan program jika itu berkaitan dengan pembangunan daerah," tandasnya. (Dhi)-f

KR-istimewa
Negatif
Amat Segera
Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 16 Februari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005